

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KOTA BANJARBARU**

LAPORAN KINERJA 2024





PEMERINTAH KOTA BANJARBARU INSPEKTORAT

Alamat : Jl.Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Banjarbaru 70713
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail: inspektorat@banjarbarukota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru untuk Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banjarbaru, 27 Februari 2025

Inspektur Kota Banjarbaru,



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197006151990031006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia Nya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai, dan memberikan gambaran tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud Program secara sistematis.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkisambungan bagi Pemerintah untuk meningkatkan kinerja di Tahun yang akan datang serta sebagai evaluasi dan pengambilan kebijakan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika serta Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Kinerja ini, semoga bermanfaat untuk kepentingan . Dinas Komunikasi dan Informatika.

Banjarbaru, Pebruari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru,



ASEP SAPUTRA, S.Kom, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19770909 200601 1 006

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana urusan Komunikasi dan informatika, urusan statistic dan urusan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/Kelemahan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru menyusun Laporan Kinerja

tahun 2024. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2024.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang

ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru diatur melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang komunikasi dan informasi publik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang informatika;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
- e. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

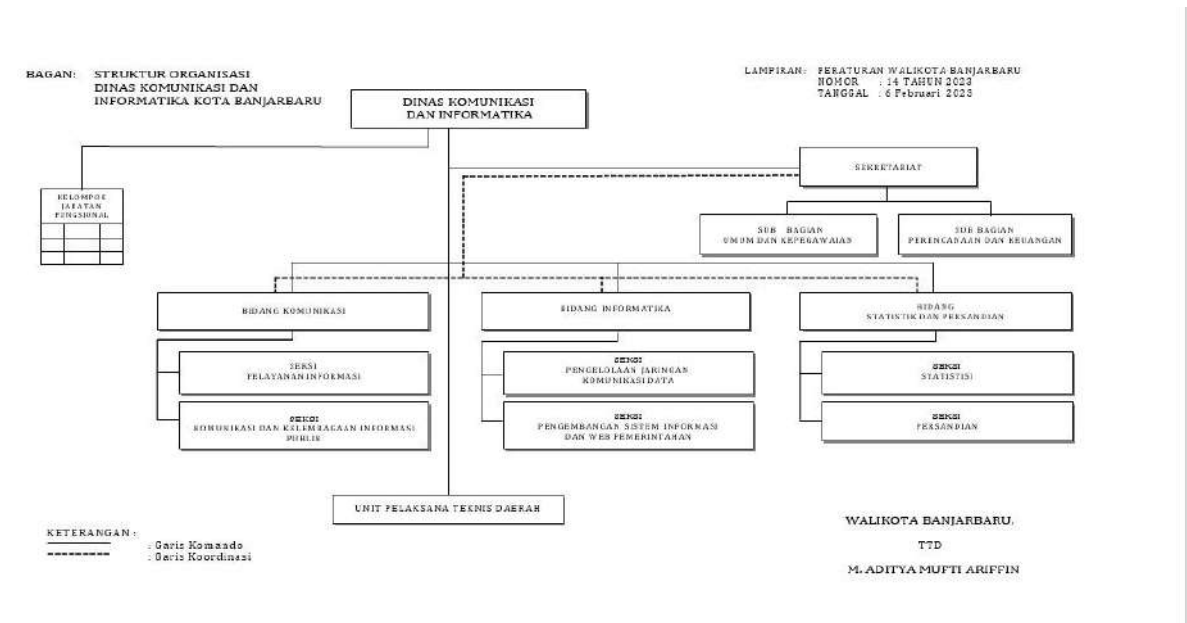
1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan tersebut, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan .
3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Informasi;

- b. Seksi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi Publik .
- 3. Bidang Informatika, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data;
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Web Pemerintahan
- 4. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi;
 - a. Seksi Statistik;
 - b. Seksi Persandian.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru didukung oleh 65 orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

Akhir Tahun 2024

| | | |
|--|---|----------|
| Apatur Sipil Negara (ASN) | : | 31 orang |
| Tenaga Kontrak | : | 33 orang |
| Dengan posisi / jabatan sebagai berikut: | | |
| Kepala Dinas (ess. IIb) | : | 1 orang |
| Sekretaris Dinas (ess. IIIa) | : | 1 orang |
| Kabid (ess. IIIb) | : | 3 orang |
| Kasubbag (ess. IVa) | : | 8 orang |
| Pejabat Fungsional Tertentu | : | 5 orang |

| | | |
|--------------------------|---|----------|
| Staf ASN/ Tenaga Kontrak | : | 51 orang |
|--------------------------|---|----------|

| Jumlah Aparatur Negeri Sipil (ASN) Menurut Pendidikan | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|--------|
| SD | SMP | SMA | DI | DIII | DIV | S-1 | S-2 | S-3 | Jumlah |
| - | - | 5 | - | 4 | - | 19 | 3 | - | 31 |
| Jumlah Tenaga Kontrak Menurut Pendidikan | | | | | | | | | |
| SD | SMP | SMA | DI | DIII | DIV | S-1 | S-2 | S-3 | Jumlah |
| - | - | 10 | - | - | - | 22 | - | - | 32 |

| Jumlah ASN Menurut Golongan/Kepangkatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-------------|---|---|---|-----|--------------|---|---|---|-----|-------------|---|---|---|-----|--------|
| Golongan I | | | | | Golongan II | | | | | Golongan III | | | | | Golongan IV | | | | | Jumlah |
| A | B | C | D | Jlh | A | B | C | D | Jlh | A | B | C | D | Jlh | A | B | C | D | Jlh | |
| | | | | | | | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 21 | 4 | 1 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | |

1.4 Aspek Strategi Organisasi dan Isu Strategis Organisasi

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah menangani isu strategis terkait **Belum Optimalnya Fasilitas Teknologi Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Informasi Publik**, yaitu dengan "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah" yang merupakan misi ketiga Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi”.

Isu strategis bersumber dari lingkungan internal maupun eksternal Pemerintah Kota Banjarbaru diwujudkan dengan melaksanakan peningkatan kapasitas dan optimalisasi kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Peningkatan jalur konektivitas pada semua unit kerja pemerintah Kota Banjarbaru.
- Pengintegrasian sistem aplikasi yang terkoneksi secara terpusat.
- Pemerataan pelayanan informasi kepada masyarakat.

- d. Peningkatan sarana komunikasi dan Informatika.
- e. Peningkatan Pemerataan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi.
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga teknis bidang IT.
- g. Peningkatan partisipasi dan pemanfaatan ketersediaan sub domain banjarbarukota.go.id oleh unit kerja pemerintah Kota Banjarbaru.
- h. Peningkatan kapasitas Bandwidth internet terpusat yang dikelola oleh Diskominfo Kota Banjarbaru.
- i. Penyediaan jalur backup jaringan internet di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- j. Peningkatan keamanan akses internet melalui pengembangan infrastruktur Jaringan yang menerapkan mekanisme firewall dan Proxy server.
- k. Peningkatan keamanan infrastruktur baru.
- l. Peningkatan kemampuan pengelolaan infrastruktur jaringan dan keamanan data dan informasi dari tenaga ahli internal Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengurangi ketergantungan kepada pihak ketiga / swasta dalam pengelolaannya.
- m. Peningkatan pemanfaatan infrastruktur jaringan yang sudah tersedia dengan mengoptimalkan server untuk penyimpanan aplikasi transaksi operasional pemerintah Kota Banjarbaru.
- n. Optimalisasi peran PPID untuk mendukung terwujudnya keterbukaan informasi.

Selain itu, paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek

akuntabilitas, transparansi dan partisipatif membawa konsekuensi pada perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan, dimana Pemerintah tidak lagi berperan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan memberikan peluang seluas-luasnya dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (*society participation*) dalam proses pembangunan bangsa.

Pemerintah meyakini bahwa konsep kota pintar (*Smart City*) dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan pembangunan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi informasi. Untuk itulah guna memperkuat peran ICT sebagai *enabler* di semua pilar *smart city* dalam menciptakan ekosistem *smart city*, khususnya pada sektor strategis yang dimiliki oleh masing-masing daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kemendagri, Kementerian PAN & RB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU & PR, Kantor Staf Presiden serta Kompas Gramedia menyelenggarakan Gerakan Menuju 100 *Smart City*. Targetnya, hingga tahun 2019 akan ada 100 daerah (25 kabupaten/kota (2017), 50 kabupaten/kota (2018) yang menjadi *role model* dalam implementasi program *smart city*. Kota Banjarbaru, termasuk dalam 100 kabupaten/kota yang terpilih sebagai *role model*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berperan sebagai *leading sector* dalam implementasi *smart city*. Pemerintah Kota Banjarbaru telah melaksanakan kegiatan implementasi *smart city* sesuai dengan jangka pendek dan jangka menengah masterplan *smart city* yang dibuat tahun 2018.

Selain itu, Bidang komunikasi dan informatika telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar. Media komunikasi yang dikembangkan

dengan dukungan teknologi sudah begitu maju dan mudah didapat oleh masyarakat, Meski demikian **masih banyak warga masyarakat yang belum akrab dengan media-media tersebut** dan masih membutuhkan media informasi yang diselenggarakan dalam bentuk konvensional seperti dialog interaktif, siaran keliling, sosialisasi dan pertunjukan rakyat, pada tahun 2021 sudah ada penyebaran informasi melalui media Banjarbaru TV.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan tantangan bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksakannya. Dalam hal ini hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik mulai perencanaan, proses pembuatan sampai pelaksanaannya dijamin oleh Undang-Undang. Dan menjadi wajib hukumnya bagi pelayan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tantangan yang harus memperoleh perhatian adalah mempersiapkan diri baik bagi aparatur secara individu maupun kelembagaan dan mendorong tumbuhnya kesiapan dari semua pihak, baik kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat secara umum.

Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah;

1. Terwujudnya Banjarbaru Smart City melalui strategi pelayanan berbasis **Information Communication Technology (ICT)** yang terintegrasi dengan arah kebijakan integrasi pelayanan di seluruh instansi pemerintahan
2. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan

3. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota
7. Penguatan jalur koneksitas antar unit kerja
8. Peningkatan implementasi e-Government Pemerintah Kota;
9. Pengembangan pusat data yang aman dan handal;
10. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan;

1.5 Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan Latar belakang, dasar hukum pembentukan dan gambaran umum organisasi, struktur organisasi, aspek strategis organisasi dan isu strategis organisasi dan system penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan pertanggungjawaban kinerja yang terdiri dari capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan strategi peningkatan kinerja

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.1.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Ket |
|---|--|--------|-----|
| Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika | Nilai Aspek SPBE | 2,75 | |
| | Persentase layanan informasi publik pemerintah daerah | 100% | |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral | Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 91% | |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi | Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah | 58% | |



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASEP SAPUTRA, S.Kom., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.
Jabatan : Wali Kota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,
WALI KOTA BANJARBARU,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA,

ASEP SAPUTRA, S.Kom., M.M.
NIP.19770909 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika | Nilai aspek SPBE | 2,75 |
| | | Persentase layanan informasi publik pemerintah daerah | 100 |
| 2. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral | Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 91 |
| 3. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi | Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah | 58 |

| Program | Anggaran |
|--|---------------------|
| 1. Pengelolaan Aplikasi Informatika | Rp. 5.220.149.550,- |
| 2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Rp. 2.862.971.950,- |
| 3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Rp. 150.186.000,- |
| 4. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi | Rp. 195.759.700,- |
| 5. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 5.642.958.254,- |

Banjarbaru, Januari 2024

Pihak Kedua,

WALI KOTA BANJARBARU,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA,

ASEP SAPUTRA, S.Kom., M.M.
NIP. 19770909 200604 1 006



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASEP SAPUTRA, S.Kom., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NURLIANI
Jabatan : Pjs. Wali Kota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2024

Pihak Kedua


Pjs. WALI KOTA BANJARBARU,



NURLIANI

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



ASEP SAPUTRA, S.Kom., M.M.
NIP. 19770909 200604 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika | Nilai aspek SPBE | 2,75 |
| | | Persentase layanan informasi publik Pemerintah Daerah | 100 |
| 2. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral | Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 91 |
| 3. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi | Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah | 58 |

| Program | Anggaran |
|---|---------------------|
| 1 Pengelolaan Aplikasi Informatika | Rp. 6.491.944.020,- |
| 2 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Rp. 3.319.277.950,- |
| 3 Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Rp. 190.185.950,- |
| 4 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Rp. 195.759.700,- |
| 5 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Rp. 6.388.157.790,- |

Banjarbaru, Oktober 2024

Pihak Kedua
Pjs. WALI KOTA BANJARBARU,


NURLIANI

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ASEP SAPUTRA, S.Kom., M.M.
NIP. 19770909 200604 1 006

1. Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan Informatika

- Indikator Kinerja adalah Nilai Aspek SPBE yaitu perhitungan nilai aspek spbe diperoleh berdasarkan nilai rata-rata jumlah tingkat kematangan masing-masing indikator spbe yang diukur dari 0 sampai dengan 5 sesuai dengan permenpan no 59 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Indikator spbe yang dimaksud adalah 20 indikator spbe yang menjadi tanggung jawab dinas komunikasi dari 35 total indikator spbe yang ada, yaitu : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah, Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE, Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data, Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah, Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data,

Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka.

- Indikator kinerjanya adalah Persentase informasi publik pemerintah daerah yaitu Jumlah informasi per bulan di bagi jumlah informasi setahun kali 100 persen.

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral

Indikator kinerjanya adalah Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yaitu Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah SKPD dikali 100 persen.

3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi

Indikator kinerjanya adalah Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah yaitu Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian di kali 100 persen Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian di kali 100 persen

Tabel 2.1.1 Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|---|--|
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik Komunikasi dan informatika | Nilai Aspek SPBE |
| | Persentase layanan informasi publik pemerintah daerah |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral | Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi | Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah |

2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru mendapat dukungan dana (murni dan perubahan) sebesar Rp. **16.585.325.410,-** (Enam Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah).

Misi 1. Meningkatnya kualitas layanan publik

Strategi :

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan :

1. Meningkatkan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan Penatalaksanaan dan Pengawasan Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Meningkatkan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
5. Meningkatkan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Meningkatkan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas
7. Melaksanakan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan SDM TIK Aparatur

Program :

Program Aplikasi Informatika

Kegiatan :

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Kegiatan :

Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Misi 2. Meningkatnya informasi publik

Strategi :

Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan :

1. Melaksanakan Monitoring opini dan aspirasi publik
2. Meningkatkan pengelolaan media komunikasi publik
3. Meningkatkan pelayanan informasi publik
4. Melaksanakan Penguatan Kapasitas SDM Komunikasi Publik
5. Meningkatkan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas

Program :

Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Kegiatan :

Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Dearah

Sub Kegiatan :

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3. Pelayanan Informasi Publik
4. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
5. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan

Misi 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral

Strategi :

Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan :

1. Membangun Metadata Statistik Sektoral
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral

Program :

Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan :

Penyelenggaraan Statistik sektoral daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Membangun Metadata Statistik Sektoral
2. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statististik sectoral

Misi 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi

Strategi :

Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi

Kebijakan :

Meningkatkan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Program :

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan :

Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Alokasi Anggaran

| PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PAGU |
|---|-------------------------|
| 1 | 2 |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Rp 6.246.192.450 |
| Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 6.246.192.450 |
| Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Rp 53.321.700 |
| Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Rp 2.510.809.000 |
| Pelayanan Informasi Publik | Rp 44.079.000 |

| | |
|---|-------------------------|
| Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Rp 276.999.900 |
| Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Rp 247.377.500 |
| Layanan Hubungan Media | Rp 3.113.605.350 |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Rp 8.892.953.500 |
| Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 3.700.139.200 |
| Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 66,399,000 |
| Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Rp 3.633.740.300 |

| | |
|--|-------------------------|
| Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 5.192.814.200 |
| Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 66.230.200 |
| Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Rp 4.659.479.600 |
| Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Rp 269.022.500 |
| Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Rp 75.651.900 |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Rp 122.430.000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Rp 175.155.000 |
| Penyelenggaraan Statistik sektoral daerah Kabupaten/Kota | Rp 175.155.000 |

| | |
|--|--------------------------|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Rp 106.577.400 |
| Membangun Metadata Statistik Sektoral | Rp 68.577.400 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Rp 173.454.130 |
| Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota | Rp 173.454.130 |
| Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 173.454.130 |
| Total | Rp 22.855.482.440 |

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang telah dibuat di tahun 2024. Dalam BAB ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2024.

Penyajian laporan pertanggungjawaban ini dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja SKPD

Tabel 3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN | TARGET 2024 | REALISASI 2024 | CAPAIAN KINERJA |
|----|--|---|---|-------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika | Nilai Aspek SPBE | Rata-rata dari 20 indikator yang menjadi kewenangan Diskominfo pada aspek SPBE | 2,75 | 2,60 | 94,55% |
| | | Persentase layanan informasi publik pemerintah daerah | Jumlah informasi per bulan di bagi jumlah informasi setahun kali 100 persen | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral | Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah SKPD | 91% | 100% | 109,89% |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|-----|-----|------|
| | | data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | dikali 100 persen | | | |
| 4 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi | Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah | Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian di kali 100 persen Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian di kali 100 persen | 58% | 58% | 100% |

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja terhadap realisasi dan capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja 2 (dua) Tahun Terakhir

| NO | INDIKATOR SASARAN | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | |
|----|--|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 1 | Aspek SPBE | 3,1 | 147,62% | 3,1 | 147,62% | 2,60 | 94,55% |
| 2 | Persentase layanan informasi publik pemerintah daerah | 102,59 | 113,98% | 102,59 | 113,98% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 86,68 | 123,81% | 86,68 | 123,81% | 100% | 109.89% |
| 4 | Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah | 53,2% | 177,33% | 53,2% | 177,33% | 58% | 100% |

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | REALISASI | TARGET RENSTRA |
|----|---|--|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika | Nilai Aspek SPBE | 2,60 | 2,2 |
| | | Persentase layanan informasi publik pemerintah daerah | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral | Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 100% | 75% |
| 3 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi | Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah | 58% | 35% |

Berdasarkan tabel di atas terlihat, sampai dengan tahun ini, semua target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi telah melampaui target.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | REALISASI | TARGET NASIONAL |
|----|---|--|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika | Nilai Aspek SPBE | 2,60 | - |
| | | Persentase layanan informasi publik pemerintah daerah | 100% | - |
| 2 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral | Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 100% | - |
| 3 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi | Persentase tingkat pengamanan informasi pemerintah | 58% | - |

Realisasi Kinerja dengan target nasional tidak dapat dibandingkan karena indikator yang ditetapkan daerah tidak sama dengan nasional.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Diskominfo Kota Banjarbaru diuraikan berdasarkan sasaran

sebagai berikut :

❖ **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika**

Indikator : Nilai Aspek SPBE

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Secara konsep, tingkat kematangan SPBE dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang nantinya mengukur derajat pengembangan SPBE.

Untuk mengukur tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK, digunakan nilai aspek SPBE. **Perhitungan nilai aspek SPBE diperoleh berdasarkan rata-rata nilai dari 20 indikator yang menjadi kewenangan Diskominfo pada aspek SPBE sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020.**

Alasan pemilihan indikator ini adalah karena nilai Aspek SPBE menggambarkan tingkat kematangan (Maturity level) pelaksanaan SPBE. Aspek SPBE mencakup banyak aspek seperti kebijakan tata kelola, kebijakan layanan SPBE, kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi informasi dan komunikasi, administrasi dan pemerintahan dan serta layanan publik.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja SKPD 2024

3.1.2 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Uraian Kinerja Tahun 2024 | | |
|----|-------------------|--------|---------------------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Aspek SPBE | Nilai | 2,75 | 2,60 | 94,55% |

Nilai aspek SPBE yang menjadi indikator kinerja Diskominfo ada pada domain Tata Kelola yaitu TIK. Berdasarkan hasil penilaian mandiri aspek TIK Kota Banjarbaru memperoleh nilai 2,75 dengan predikat Baik

3.1.3 Tabel Indikator Aspek SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

| NO | Indikator | Nilai Tingkat Kematangan |
|------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | Domain Kebijakan SPBE | |
| I. | Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | |
| 1 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah | 3 |
| 2 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah | 3 |
| 3 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data | 3 |
| 4 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE | 3 |
| 5 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data | 3 |
| 6 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah | 3 |
| 7 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi | 3 |
| 8 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi | 2 |
| 9 | Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah | 3 |
| B. | Domain Tata Kelola SPBE | |
| II. | Aspek Perencanaan Strategis SPBE | |
| 10 | Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 3 |
| 11 | Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 3 |

| | | |
|------------------|---|-------------|
| III. | Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi | |
| 12 | Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE | 1 |
| 13 | Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data | 3 |
| 14 | Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 3 |
| 15 | Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah | 2 |
| IV. | Aspek Penyelenggara SPBE | |
| 16 | Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah | 1 |
| C. | Domain Manajemen SPBE | |
| V. | Aspek Penerapan Manajemen SPBE | |
| 17 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | 2 |
| 18 | Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data | 2 |
| D. | Domain Layanan SPBE | |
| VI. | Aspek layanan Publik Berbasis Elektronik | |
| 19 | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik | 4 |
| 20 | Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka | 2 |
| Total | | 52 |
| Rata-Rata | | 2,60 |

3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

3.1. 4 Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi 2022 | | Realisasi 2023 | | Realisasi 2024 | |
|-----|-------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 1. | Nilai Aspek SPBE | 3,1 | 147,62% | 3,1 | 147,62% | 2,60 | 94,55% |

Perbandingan Kinerja 2 tahun terakhir terlihat kinerja pada tahun 2024 menurun karena pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE dianggap oleh evaluator tidak maksimal.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

Tabel 3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi 2024 | Provinsi Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Kabupaten Banjar | Kabupaten Barito Kuala |
|-----|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Nilai Aspek SPBE | 2,60 | - | - | - | - |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi belum dapat dibandingkan karena perbedaan penentuan indikator yang ditetapkan masing-masing kabupaten/kota.

3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

Nasional

Tabel 3.1.6 Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi 2024 | Target RPJMD Tahun 2024 | Target Nasional Tahun 2023 |
|-----|-------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. | Nilai Aspek SPBE | 2,60 | 2,75 | - |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD sudah melampaui target dan Target Nasional belum dapat dibandingkan karena perbedaan penentuan indikator yang ditetapkan.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

a. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai indikator kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah :

1. Kebijakan yang mengatur terkait tata kelola SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan dan penyelenggaraan SPBE yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarbaru no 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE sebagai dasar hukum penerapan pengelolaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang telah disesuaikan dengan perpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang SPBE.
2. Pemerintah Kota Banjarbaru telah memiliki dokumen kebijakan arsitektur dan peta rencana SPBE sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarbaru dapat terlihat adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang baik dibuktikan dengan adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik seperti SIPD, SPSE, Simpeg, SRIKANDI, aplikasi banjarbaru bagawi, aplikasi e-kinerja.
4. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarbaru dapat terlihat adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang baik dibuktikan dengan adanya penggunaan layanan publik berbasis elektronik seperti Satu Data Kota Banjarbaru, LAPOR, PPID, JDIH, aplikasi satu pintu INTAN BJB, aplikasi RSD Idaman, aplikasi Dukcapil Banjarbaru.

b. Hambatan

1. Pelaksana penyelenggara SPBE pada Pemerintah Kota Banjarbaru masih sebatas pada surat keputusan tentang pembentukan tim koordinasi SPBE dan pembentukan tim asesor internal SPBE.
2. Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional sehingga Pemerintah Kota Banjarbaru belum dapat mengisi detail arsitektur SPBE dan Peta Rencana kedalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE.

3. Penerapan manajemen SPBE belum dilaksanakan secara optimal baik dari segi manajemen resiko, keamanan informasi, data, asset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE sehingga pelaksanaan SPBE belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Belum dilaksanakannya Audit TIK yang terdiri dari audit Infrastruktur, audit Aplikasi dan audit Keamanan Informasi SPBE.
5. Pedoman Manajemen SPBE pemerintah Kota Banjarbaru belum dibuat dan ditetapkan sehingga manajemen SPBE belum dilaksanakan sesuai dengan delapan manajemen yang terdapat pada peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan peningkatan dalam Pelaksanaan penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Kota Banjarbaru;
2. Menyesuaikan dokumen arsitektur SPBE berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional dan menginputkannya pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE;
3. Pada penerapan manajemen SPBE akan dilaksanakan secara optimal baik dari segi manajemen resiko, keamanan informasi, data, asset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE sehingga pelaksanaan SPBE dapat dilaksanakan secara maksimal;
4. Melaksanakan Audit TIK yang terdiri dari audit Infrastruktur, audit Aplikasi dan audit Keamanan Informasi SPBE;
5. Memproses dan menetapkan penyusunan Pedoman Manajemen SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dukungan anggaran untuk menunjang sasaran ini berasal dari 1 (satu) program yaitu : Program Aplikasi Informatika dengan realisasi sebagai berikut

Tabel 3.1.7 Realisasi Anggaran

| PROGRAM/SUB KEGIATAN | Anggaran | | Persentase (%) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | Pagu | Realisasi | Anggaran |
| Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Rp 6.491.944.020 | Rp 6.190.552.134 | 95,35% |
| Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 84.998.550 | Rp 80.346.325 | 94,53% |
| Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Rp 1.524.887.270 | Rp 1.390.987.650 | 91,22% |
| Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 35.570.100 | Rp 26.187.950 | 73,62% |
| Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Rp 4.420.034.200 | Rp 4.350.503.659 | 98,43% |
| Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Rp 290.222.200 | Rp 259.972.400 | 89,58% |
| Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Rp 63.801.900 | Rp 40.040.550 | 62,76% |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Rp 72.429.800 | Rp 42.513.600 | 58,70% |

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase serapan anggaran adalah sebesar 93,77% dan nilai capaian kinerja sebesar 125%.

Efisiensi penggunaan sumber daya dihitung dengan menggunakan formula persentase capaian kinerja dikurangi persentase serapan anggaran sehingga diperoleh hasil 31,23%.

Indikator : Persentase informasi publik pemerintah daerah

Metode pengukuran dilakukan dengan cara menghitung Jumlah informasi per bulan di bagi jumlah informasi setahun kali 100 persen.

Alasan pemilihan indikator adalah karena UU Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang.

3.1.7 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

3.1.8 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Uraian Kinerja Tahun 2024 | | |
|----|---|--------|---------------------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase layanan informasi publik pemerintah daerah | % | 100 | 100 | 100 |

Penyebaran informasi Pemerintah Daerah dilakukan melalui beberapa saluran informasi, seperti Media Center, Media Sosial (Youtube Banjarbaru TV, Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok), Media Massa (Cetak, Elektronik, dan siber), serta Aplikasi SIP-PPID.

3.1.9 Tabel Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah

DESIMINASI INFORMASI TAHUN 2024

| NO. | JENIS/NAMA MEDIA | JUMLAH KONTEN | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | Media Center Banjarbaru | 573 | Rilis berita |
| 2 | Youtube Banjarbaru TV | 245 | Video, live streaming, Talkshow |
| 3 | Instagram Banjarbaru TV | 1,247 | Post, stories, reels, video |
| 4 | Facebook Diskominfo Banjarbaru | 266 | Video, gambar, tautan, reels, story |

| | | | |
|----|-------------------------|-------|-------------------------------------|
| 5 | Tiktok Banjarbaru TV | 173 | |
| 6 | Twitter diskominfo_bjb | 556 | |
| 7 | Infopublik.id | 520 | Rilis berita |
| 8 | RRI.co.id | 124 | Rilis berita |
| 9 | Aplikasi SIP-PPID | 2,256 | Penyediaan dokumen informasi publik |
| | MEDIA CETAK | | |
| 10 | Banjarmasin Post | 96 | Rilis berita |
| 11 | Radar Banjarmasin | 240 | Rilis berita |
| 12 | Kalimantan Post | 120 | Rilis berita |
| 13 | Barito Post | 96 | Rilis berita |
| | MEDIA ELEKTRONIK | | |
| 14 | Duta TV | 120 | Rilis berita |
| 15 | TVRI Kalimantan Selatan | 96 | Rilis berita |
| 16 | Kompas TV Banjarmasin | 24 | Rilis berita |
| 17 | Radio Abdi Persada | 48 | Rilis berita |
| | MEDIA SIBER | | |
| 18 | banjarmasinpost.co.id | 240 | Rilis berita |
| 19 | kalsel.antaranews.com | 300 | Rilis berita |
| 20 | infobanua.co.id | 204 | Rilis berita |
| 21 | bakabar.com | 204 | Rilis berita |
| 22 | kanalkalimantan.com | 204 | Rilis berita |
| 23 | klikkalsel.com | 204 | Rilis berita |
| 24 | teras7.com | 156 | Rilis berita |
| 25 | riliskalimantan.com | 156 | Rilis berita |
| 26 | borneotrend.com | 156 | Rilis berita |
| 27 | jejakrekam.com | 156 | Rilis berita |
| 28 | koranbanjar.net | 204 | Rilis berita |
| 29 | kalselpos.com | 156 | Rilis berita |
| 30 | wartaniaga.com | 156 | Rilis berita |
| 31 | asyikasyik.com | 144 | Rilis berita |
| 32 | kalimantanlive.com | 156 | Rilis berita |
| 33 | redaksi8.com | 156 | Rilis berita |
| 34 | headline9.com | 144 | Rilis berita |
| 35 | banjarbaruklik.com | 156 | Rilis berita |
| 36 | poroskalimantan.com | 156 | Rilis berita |
| 37 | mediakita.co.id | 144 | Rilis berita |

| | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 38 | pojokbanua.com | 156 | Rilis berita |
| 39 | habarkalimantan.com | 156 | Rilis berita |
| 40 | suratkabardigital.com | 144 | Rilis berita |
| 41 | beritabanjarbaru.com | 144 | Rilis berita |
| 42 | klikkalimantan.com | 144 | Rilis berita |
| 43 | retorikabanua.com | 144 | Rilis berita |
| 44 | reportase9.com | 144 | Rilis berita |
| 45 | Banua TV | 72 | Rilis berita |
| 46 | Katajari.com | 72 | Rilis berita |
| JUMLAH | | 11,528 | |

3.1.8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

3.1.10 Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi 2022 | | Realisasi 2023 | | Realisasi 2024 | |
|-----|---|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase layanan informasi publik pemerintah daerah | 100% | 100% | 100% | 115% | 100% | 100% |

Perbandingan Kinerja 2 tahun terakhir terlihat kinerja pada tahun 2024 sama

3.1.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

3.1.11 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi 2024 | Provinsi Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Kabupaten Banjar | Kabupaten Barito Kuala |
|-----|---|----------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Persentase layanan informasi publik pemerintah daerah | 100 | - | - | - | - |

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi belum dapat dibandingkan karena perbedaan penentuan indikator yang ditetapkan masing-masing kabupaten/kota.

3.1.10 Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

3.1.12 Tabel Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi 2024 | Target RPJMD Tahun 2024 | Target Nasional Tahun 2024 |
|-----|---|----------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. | Persentase layanan informasi publik pemerintah daerah | 100 | 100 | - |

3.1.11 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

a. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai indikator kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Telah tersedianya media akses Informasi Publik, seperti Media Sosial (Youtube Banjarbaru TV, IG, Twitter, FB, Tik Tok), Aplikasi SIP-PPID
2. Telah terjalin kerjasama dengan perusahaan media (cetak, elektronik, dan siber) dalam penyebarluasan berita
3. Telah adanya peraturan yang jelas tentang prosedur layanan informasi publik
4. Telah terbentuk PPIDP pada unit kerja beserta admin SIP-PPID yang

memudahkan unit kerja dalam menyampaikan dokumen informasi publik.

5. Telah terbentuknya KIM di semua kelurahan
6. Terdapat jadwal publikasi informasi secara berkala ke media informasi yang dimiliki.

b. Hambatan

1. Kurangnya komitmen pengurus Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam konsistensi penyebaran informasi publik yang dikelola
2. Kurangnya perangkat pendukung dalam pengolahan media konten baik untuk photography atau videography oleh tim multimedia
3. Belum adanya analisis jumlah sebaran publikasi dan isu publik yang terkelola media pers yang bekerjasama di Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Diseminasi informasi belum optimal, terutama diseminasi informasi dari pemerintah dan pemerintah Provinsi.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik meliputi kegiatan :
 - a. pelaksanaan fungsi PPID; dan
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat.

Beberapa permasalahan terkait kegiatan ini adalah :

1. PPID kurang memahami UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya,

dampaknya Pengelolaan informasi tidak sesuai dengan regulasi, seperti tidak diumumkannya informasi berkala dan serta merta, permintaan informasi belum dilaksanakan sesuai ketentuan.

2. Keterbatasan anggaran, menyebabkan pelatihan tentang prinsip-prinsip keterbukaan informasi hanya dilaksanakan untuk admin SIP-PPID, sementara untuk PPID Pelaksana belum dapat diselenggarakan sehingga kontrol terhadap ketersediaan informasi sesuai peraturan masih rendah.
3. Pemahaman terhadap konsep keterbukaan informasi belum merata.

6. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik meliputi kegiatan :

- a. pemantauan Isu Publik di media massa dan media sosial;
- b. pengumpulan pendapat umum;
- c. pemantauan aduan masyarakat; dan
- d. evaluasi dan pemilihan Isu Publik.

Belum semua kegiatan Monitoring dan Aspirasi Publik dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Keterbatasan SDM, menyebabkan kegiatan pengumpulan dan analisis informasi hanya dilakukan melalui beberapa media yaitu media cetak media daring. Itupun hanya pada media yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota. Belum dilakukan analisis

terhadap media sosial, radio, dan televisi sesuai Permenkominfo 8 Tahun 2019.

- b. Belum dilaksanakan pengumpulan pendapat umum (belum pernah ada polling ke masyarakat berdasarkan isu strategis)
- c. Pemantauan aduan masyarakat baru dilaksanakan melalui aplikasi SP4N-LAPOR, sementara pada unit-unit kerja terdapat kanal-kanal pengaduan yang lain. Hal ini membuat analisi dan rekomendasi yang dibuat kurang akurat.
- d. Aplikasi SP4N-LAPOR belum tersosialisasi dengan baik (termasuk kepada internal Pemko Banjarbaru) sehingga partisipasi masyarakat masih kurang

c. Rencana Tindak Lanjut

- 1. melakukan penguatan SDM anggota KIM melalui pelatihan dan pertemuan/sarasehan secara rutin
- 2. Perlu diusulkan perencanaan anggaran belanja modal terkait perangkat pendukung pengolahan konten ditahun berikutnya
- 3. Perlu perangkat lunak atau sejenisnya yang mendukung analisis media perbulannya
- 4. Menyusun strategi komunikasi untuk diseminasi informasi agar diseminasi informasi dapat optimal.
- 5. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan terstruktur
- 6. Penambahan anggaran untuk Bimtek dengan narasumber yang kompeten
- 7. Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada admin dan PPID Pelaksana

8. Penambahan SDM yang khusus memantau isu publik di media massa dan media sosial
9. Membuat polling sesuai isu strategis dari pimpinan
10. Aduan yang diterima melalui kanal lain selain LAPOR! Dapat diinputkan oleh admin di unit kerja ke aplikasi LAPOR!
11. Memanfaatkan kanal-kanal publikasi yang dimiliki untuk sosialisasi Penggunaan aplikasi LAPOR!, kolaborasi dengan bidang/skpd lain dalam mensosialisasikan aplikasi LAPOR!, penambahan anggaran untuk sosialisasi secara langsung.

3.1.12 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dukungan anggaran untuk menunjang sasaran ini berasal dari program yaitu : Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Tabel 3.1.13 Realisasi Anggaran

| PROGRAM/SUB KEGIATAN | Anggaran | | Persentase (%) |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | Alokasi | Realisasi | Anggaran |
| PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 3,319,277,950 | 3,211,930,957 | 96.77% |
| Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | 53,321,700 | 52,629,150 | 98.70% |
| Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 275,808,900 | 261,992,790 | 94.99% |
| Pelayanan Informasi Publik | 44,079,000 | 35,363,600 | 80.23% |

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------|
| Layanan Hubungan Media | 2,321,105,300 | 2,252,887,800 | 97.06% |
| Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | 150,654,850 | 146,375,575 | 97.16% |
| Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 474,308,200 | 462,682,042 | 97.55% |

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase serapan anggaran adalah sebesar 96,77% dan nilai capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100%.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral

Indikator : Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Alasan pemilihan indikator adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3.1.13 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

3.1.14 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No. | Indikator Kinerja | satuan | Uraian Kinerja Tahun 2024 | | |
|-----|--|--------|---------------------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | 91 | 100 | 109,89 |

Berdasarkan hasil Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral 2024 kepada 35 responden yang mana responden berasal dari SKPD termasuk Bagian Sekretariat Kota (tidak termasuk kecamatan) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, diperoleh kesimpulan bahwa sebanyak 100% SKPD yang menggunakan layanan Data Statistik Sektoral Daerah sebagai rujukan baik dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi pembangunan daerah. Berikut ke 35 responden SKPD yang menggunakan layanan data statistik sektoral daerah yaitu :

Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru :

1. Bagian Umum Setdako Banjarbaru;
2. Bagian Pemerintahan Setdako Banjarbaru;
3. Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Banjarbaru;
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Banjarbaru;
5. Bagian Organisasi Setdako Banjarbaru;
6. Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Banjarbaru;
7. Bagian Protokol dan Komunikasi Setdako Banjarbaru;
8. Bagian Hukum Setdako Banjarbaru;
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarbaru;
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
12. Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru ;
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru;
14. Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru;

15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru;
16. Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
18. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;\
19. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru;
20. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarbaru;
21. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Banjarbaru;
22. Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru;
23. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru;
24. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
25. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru;
26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
27. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;
28. Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru;
29. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru;
30. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru;
31. Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Banjarbaru;
32. Inspektorat Kota Banjarbaru;
33. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
34. Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;

35. Satuan Polisi Pamong Praja;

3.1.14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

3.1.15 Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi 2022 | | Realisasi 2023 | | Realisasi 2024 | |
|-----|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 86,68% | 123,81% | 86,68% | 123,81% | 100% | 109,89% |

3.1.15 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

3.1.16 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi 2024 | Provinsi Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Kabupaten Banjar | Kabupaten Barito Kuala |
|-----|--|----------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 100% | - | - | - | - |

3.1.16 Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target

Nasional

3.1.17 Tabel Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi 2024 | Target RPJMD Tahun 2024 | Target Nasional Tahun 2023 |
|-----|--|----------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. | Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 100 | 80 | - |

3.1.17 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penyelenggaraan statistik sektoral Kota Banjarbaru TA 2024 melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral berjalan dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi kegiatan TA 2024. Adapun keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

a. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai indikator kinerja

1. Tersedianya data statistik sektoral daerah Kota Banjarbaru yang telah dilengkapi dengan metadata yang terupdate setiap tahun;
2. Data statistik sektoral daerah Kota Banjarbaru didiseminasikan melalui publikasi Buku Statistik Sektoral Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 dan dibagipakaikan melalui Portal Satu Data

- Banjarbaru yang telah terintegrasi dengan Portal Banua Provinsi Kalimantan Selatan dan Portal Satu Data Indonesia Bappenas RI;
3. Publikasi Buku Statistik Sektorial Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah mendapat rekomendasi dari BPS Kota Banjarbaru dengan nomor V-21.6372.001;
 4. Terbitnya regulasi daerah yang mengatur Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kota Banjarbaru yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 30 Tahun 2023 tentang Satu Data Banjarbaru dan Surat Edaran Nomor 500.14/179/IV/Statsandi/DISKOMINFO/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorial Di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru;
 5. Pada Akhir Tahun 2024, telah dilakukan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral oleh BPS RI dengan hasil evaluasi berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Banjarbaru sebesar 2,83 dengan predikat BAIK. Pencapaian IPS Kota Banjarbaru Tahun 2024 masuk peringkat 3 dari 13 Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan;
 6. Berdasarkan hasil survei kebutuhan data statistik sektoral yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa layanan data statistik sektoral daerah yang diberikan digunakan 100% oleh SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka penyusunan perencanaan maupun evaluasi pembangunan daerah.

b. Hambatan

Hambatan dalam penyelenggaraan statistik sektoral antara lain sebagai berikut :

1. Keterbatasan kompetensi SDM, tidak semua perangkat daerah memiliki tenaga ahli yang kompeten dalam pengelolaan dan analisis data statistik. Selain itu keterbatasan jumlah SDM dimana personil yang bertugas untuk menangani statistik sering kali terbatas jumlahnya sehingga tidak dapat menangani semua aspek statistik secara optimal.
2. Kurangnya koordinasi internal perangkat daerah dalam pengelolaan data sektoral sehingga data sektoral yang dihimpun tidak lengkap dan tidak terstandar.
3. Keterbatasan anggaran, pengumpulan data memerlukan biaya besar, terutama untuk survei lapangan/studi tiru, pengadaan teknologi, dan pelatihan SDM. Banyak perangkat daerah menghadapi keterbatasan anggaran yang memengaruhi kualitas statistik yang dihasilkan.
4. Minimnya pemahaman tentang pentingnya Data. Beberapa pemangku kepentingan kurang memahami nilai statistik sektoral, sehingga tidak memberikan perhatian atau dukungan secara maksimal.

c. Rencana Tindak Lanjut

1. Setiap SKPD harus memiliki SDM fungsional statistik dan atau pranata komputer untuk menangani pengelolaan dan analisis data.

2. Meningkatkan kapasitas SDM dengan mengadakan secara intens pelatihan dan bimbingan teknis.
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi.
4. Meningkatkan anggaran dan dukungan kebijakan untuk mendukung kegiatan statistik sektoral.
5. Menerapkan standarisasi dalam metode dan format data untuk memastikan konsistensi dan kualitas.

3.1.18 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dukungan anggaran untuk menunjang sasaran ini berasal dari 1 (satu)

Program yaitu : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran

| PROGRAM/SUB KEGIATAN | Anggaran | | Persentase (%) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|
| | Alokasi | Realisasi | Anggaran |
| Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Rp 190.185.950 | Rp. 186.953.275 | 98,30% |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Rp 128.388.650 | Rp 126.129.175 | 98,24% |
| Membangun Metadata Statistik Sektoral | Rp 61.797.300 | Rp 60.824.100 | 98,43% |

Berdasarkan perhitungan diatas, persentase serapan anggaran adalah sebesar 98,30% dan nilai capaian kinerja pada sasaran ini adalah 109,98%.

❖ **Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi**

Indikator : Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disruptif pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama.

Berdasarkan Perpres No. 53 Tahun 2017 jo Perpres No. 133 Tahun 2017 tentang BSSN, Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Permenkominfo Nomor 4 tahun 2016 tentang sistem manajemen pengamanan informasi, peraturan BSSN nomor 2 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja BSSN, peraturan BSSN no 5 tahun 2018 tentang rencana strategis BSSN dan Peraturan BSSN no 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia

Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi.

Perhitungannya adalah Jumlah nilai per area keamanan informasi per Jumlah area keamanan dikalikan seratus persen.

3.1.19 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

3.1.19 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Uraian Kinerja Tahun 2024 | | |
|----|--|--------|---------------------------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | % | 58 | 58% | 100% |

Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2024 : Alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi suatu organisasi. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Adapun Ruang lingkup penilaian Indeks KAMI adalah sebagai berikut :

1. Tata Kelola
2. Pengelolaan Resiko
3. Kerangka Kerja
4. Pengelolaan Aset
5. Teknologi
6. Penanggulangan dan Pemulihan

Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di masing-masing area di bawah ini :

Tabel 3.1.20 Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2024

| | | | |
|----------------------------|---|--|-----------|
| Bagian I : | Skor penetapan Kategori Sistem Elektronik | | 21 |
| Kategori Sistem Elektronik | Menunjukkan Status Kategori Sistem Elektronik | | TINGGI |

Catatan : Adapun korelasi antara Kategori Sistem Elektronik dengan Status Kesiapan didefinisikan melalui tabel (terlampir)

| | | | |
|-------------|---|--|------------|
| Bagian II: | Tata Kelola Keamanan Informasi | Total Nilai Evaluasi Tata Kelola | 99 |
| Bagian III: | Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi | Total Nilai Evaluasi Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi | 34 |
| Bagian IV: | Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi | Total Nilai Evaluasi Kerangka Kerja | 56 |
| Bagian V: | Pengelolaan Aset Informasi | Total Nilai Evaluasi Pengelolaan Aset | 111 |
| Bagian VI: | Teknologi dan Keamanan Informasi | Total Nilai Evaluasi Teknologi dan Keamanan Informasi | 79 |
| | Jumlah Nilai Per Area Keamanan Informasi | | 379 |
| Bagian VII: | Suplemen : (Penanggulangan dan Pemulihan) | | |
| - | Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga | 67% | |
| - | Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan | 67% | |
| - | Perlindungan Data Pribadi | 50% | |

3.1.20 Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja 2 tahun terakhir

Tabel 3.1.21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi 2022 | | Realisasi 2023 | | Realisasi 2024 | |
|-----|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 1. | Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | 53,2% | 177,33% | 53,2% | 177,33% | 58% | 100% |

3.1.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

3.1.22 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi 2024 | Provinsi Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Kabupaten Banjar | Kabupaten Barito Kuala |
|-----|--|----------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1. | Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | 58 | - | - | - | - |

3.1.21 Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

3.1.22 Tabel Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir RPJMD dan Target Nasional

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi 2024 | Target RPJMD Tahun 2024 | Target Nasional Tahun 2023 |
|-----|--|----------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. | Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah | 58% | 40% | 35% |

3.1.23 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

a. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai indikator kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah

1. Pada ruang lingkup penilaian tata kelola keamanan informasi ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program keamanan informasi yang tercantum dalam tugas dan fungsi dalam Dinas Komunikasi dan Informatika urusan persandian tercantum dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017, menerapkan pelaksanaan sosialisasi/literasi terkait keamanan informasi dan mengikuti peningkatan kompetensi dalam rangka penyelenggaraan persandian dalam rangka keamanan informasi bagi pejabat ataupun pengelola keamanan informasi dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sertifikat elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang tercantum dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan secara bertahap dalam rangka fasilitasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dalam hal ini penggunaan tanda tangan elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
2. Pada ruang lingkup penilaian pengelolaan resiko keamanan informasi masih dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan secara bertahap dilakukan dengan memberikan edukasi terkait pengelolaan resiko keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

3. Pada ruang lingkup penilaian kerangka kerja ini dapat dilihat adanya strategi penerapan keamanan informasi telah diterapkan dapat dilihat dengan pelaksanaan pemanfaatan sertifikat elektronik yaitu pemanfaatan tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
4. Pada ruang lingkup penilaian pengelolaan aset informasi ini dapat dilihat adanya pelaksanaan klasifikasi aset informasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pada ruang lingkup penilaian teknologi dan keamanan informasi dapat terlihat adanya penggunaan layanan internet yang telah difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang diamankan, dengan pembagian jalur akses khusus di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru, pelaksanaan identifikasi kerentanan dan penilaian resiko keamanan sistem elektronik dan menerapkan pengamanan untuk mendeteksi dan pencegah penggunaan akses jaringan yang tidak resmi.
6. Pada ruang lingkup penilaian penanggulangan dan pemulihan dilakukan pengelolaan secara bertahap dan berkesinambungan terhadap ancaman insiden yang telah menyerang sistem elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

b. Hambatan :

1. Kelembagaan pelaksanaan urusan persandian yang belum memadai, tidak sesuai pelaksanaan hasil pemetaan urusan persandian. Level kelembagaan pelaksana urusan pemerintahan

urusan persandian memiliki kecenderungan turun grade sehingga berpengaruh terhadap kinerja pelaksana urusan persandian.

2. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang karena masih perlu banyak mengikuti bimtek, workshop, seminar dan/atau focus group discussion untuk pengelola sistem elektronik dan pengelola keamanan informasi dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur.
3. Ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang menangani keamanan informasi masih rendah.
4. Budaya kesadaran keamanan informasi masih beragam dan relatif rendah dilingkungan pemerintah Kota Banjarbaru.

c. Rencana Tindak Lanjut :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaksanaan urusan persandian dengan menyesuaikan pelaksanaan hasil pemetaan urusan persandian. Mengupayakan Level kelembagaan pelaksana urusan persandian memiliki kecenderungan naik grade sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pelaksana urusan persandian.
2. Meningkatkan Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi dilaksanakan secara matang. Salah satunya diupayakan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM dengan mengikuti bimtek, workshop, seminar

dan/atau focus group discussion untuk pengelola sistem elektronik dan pengelola keamanan informasi dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur.

3. Mengupayakan peningkatan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang menangani keamanan informasi.
4. Peningkatan kualitas layanan keamanan informasi melalui literasi budaya kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

3.1.24 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dukungan anggaran untuk menunjang sasaran ini berasal dari program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan jumlah anggaran Rp. 195.759.700 dan terealisasi Rp.186.497.900 atau 95,27%.

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran

| PROGRAM/SUB KEGIATAN | Anggaran | | Persentase (%) |
|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | Alokasi | Realisasi | Anggaran |
| Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | Rp. 195.759.700 | Rp. 186.497.900 | 95,27% |
| Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 195.759.700 | Rp 186.497.900 | 95,27% |

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24 Anggaran dan Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Pagu | Realisasi | % |
|---|--|--------|-----------|---------------|---------------|-------|
| Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika | Nilai Aspek SPBE | 2,75 | 2,60 | 8.892.953.500 | 8.338.742.167 | 93,77 |
| | Persentase layanan informasi publik pemerintah daerah | 100% | 100% | 6.246.192.450 | 6.080.992.941 | 97,36 |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral | Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 91% | 100% | 175.155.000 | 173.223.735 | 98,90 |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi | Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah | 58% | 58% | 199.503.500 | 197.113.500 | 98,80 |

Alokasi anggaran digunakan untuk aktivitas yang menunjang pencapaian kinerja. Di tahun 2024 tidak ada anggaran yang di *refocusing*;

4.1 Simpulan

Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Untuk itu, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu :

1. Kebijakan yang mengatur terkait tata kelola SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan dan penyelenggaraan SPBE yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarbaru no 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE sebagai dasar hukum penerapan pengelolaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang telah disesuaikan dengan perpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang SPBE.
2. Pada Aspek perencanaan strategis SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru telah memiliki dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarbaru dapat terlihat adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang baik dibuktikan dengan adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik seperti SIPD, SPSE, Simpeg, SRIKANDI, aplikasi banjarbaru bagawi.

4. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarbaru dapat terlihat adanya penggunaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang baik dibuktikan dengan adanya penggunaan layanan publik berbasis elektronik seperti LAPOR, PPID, JDIH, aplikasi satu pintu INTAN BJB, aplikasi RSD Idaman, aplikasi Dukcapil Banjarbaru.
5. Telah tersedianya media akses Informasi Publik, seperti Media Sosial (Youtube Banjarbaru TV, IG, Twitter, FB, Tik Tok), Aplikasi SIP-PPID.
6. Telah terjalin kerjasama dengan perusahaan media (cetak, elektronik, dan siber) dalam penyebarluasan berita.
7. Telah adanya peraturan yang jelas tentang prosedur layanan informasi publik.
8. Telah terbentuk PPIDP pada unit kerja beserta admin SIP-PPID yang memudahkan unit kerja dalam menyampaikan dokumen informasi publik..Telah terbentuknya KIM di semua kelurahan.
9. Terdapat jadwal publikasi informasi secara berkala ke media informasi yang dimiliki.
10. Tersedianya data statistik sektoral daerah Kota Banjarbaru yang *terupdate* setiap tahunnya
11. Data statistik sektoral daerah Kota Banjarbaru telah memenuhi prinsip SDI yang mana Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) disajikan selain dalam bentuk buku statistik sektoral daerah juga dalam bentuk digital melalui Aplikasi Portal Satu Data Banjarbaru yang telah terintegrasi dengan portal SDI Bappenas RI

12. Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) juga dilengkapi dengan metadata yang telah mendapat rekomendasi dari BPS Kota Banjarbaru dengan nomor V-21.6372.001
13. Terbitnya Perwali No 30 tahun 2023 tentang Satu Data Banjarbaru
14. Layanan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang disajikan hampir semua SKPD yakni sebesar 91, 42% menggunakannya sebagai rujukan utama maupun data dukung dalam menyusun perencanaan pembangunan
15. Pada ruang lingkup penilaian tata kelola keamanan informasi ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program keamanan informasi yang tercantum dalam tugas dan fungsi dalam Dinas Komunikasi dan Informatika urusan persandian tercantum dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017, menerapkan pelaksanaan sosialisasi/literasi terkait keamanan informasi dan mengikuti peningkatan kompetensi dalam rangka penyelenggaraan persandian dalam rangka keamanan informasi bagi pejabat ataupun pengelola keamanan informasi dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sertifikat elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang tercantum dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan secara bertahap dalam rangka fasilitasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dalam hal ini penggunaan tanda tangan elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
16. Pada ruang lingkup penilaian pengelolaan resiko keamanan informasi masih dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan secara bertahap dilakukan dengan

memberikan edukasi terkait pengelolaan resiko keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

17. Pada ruang lingkup penilaian kerangka kerja ini dapat dilihat adanya strategi penerapan keamanan informasi telah diterapkan dapat dilihat dengan pelaksanaan pemanfaatan sertifikat elektronik yaitu pemanfaatan tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
18. Pada ruang lingkup penilaian pengelolaan aset informasi ini dapat dilihat adanya pelaksanaan klasifikasi aset informasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
19. Pada ruang lingkup penilaian teknologi dan keamanan informasi dapat terlihat adanya penggunaan layanan internet yang telah difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang diamankan, dengan pembagian jalur akses khusus di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru, pelaksanaan identifikasi kerentanan dan penilaian resiko keamanan sistem elektronik dan menerapkan pengamanan untuk mendeteksi dan pencegah penggunaan akses jaringan yang tidak resmi.
20. Pada ruang lingkup penilaian penanggulangan dan pemulihan dilakukan pengelolaan secara bertahap dan berkesinambungan terhadap ancaman insiden yang telah menyerang sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Akhirnya, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance).

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

1. Melakukan peningkatan dalam Pelaksanaan penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Kota Banjarbaru;
2. Pada penerapan manajemen SPBE akan dilaksanakan secara optimal baik dari segi manajemen resiko, keamanan informasi, data, asset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE sehingga pelaksanaan SPBE dapat dilaksanakan secara maksimal;
3. Melaksanakan Audit TIK yang terdiri dari audit Infrastruktur, audit Aplikasi dan audit Keamanan Informasi SPBE;
4. Memproses dan menetapkan penyusunan Pedoman Manajemen SPBE Pemerintah Kota Banjarbaru;
5. Penyediaan sarana publikasi luar ruang (videotron) untuk publikasi program serta komunikasi menggunakan media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar untuk mengakomodir masyarakat yang tidak memiliki sarana untuk mengakses informasi digital;
6. Pelatihan literasi digital dan kampanye anti hoaks dengan melibatkan komunitas;
7. Meningkatkan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi LAPOR! Untuk menyampaikan laporan, aspirasi maupun permintaan informasi;
8. Menyusun strategi komunikasi untuk diseminasi informasi agar diseminasi informasi dapat optimal;

9. Penyamaan persepsi tentang Keterbukaan Informasi Publik dan meningkatkan peran PPIDP pada unit kerja dalam memilah informasi yang akan disampaikan kepada publik;
10. Memberikan dukungan teknis dan sumber daya kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) termasuk bantuan pelatihan, teknologi, alat promosi, dan materi informasi;
11. Melaksanakan monitoring opini dan aspirasi masyarakat melalui media sosial, khususnya media sosial pimpinan dan unit kerja yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat;
12. Melaksanakan bimbingan teknis secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pengelola pengaduan, admin, maupun komunitas yang terlibat dalam penyebaran informasi publik;
13. Meminta SKPD untuk menunjuk SDM sebagai pengelola data SKPD yang memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang data;
14. Mengkomunikasikan secara berjenjang dengan unit kerja terkait untuk memberi dukungan dalam hal optimalisasi pengelolaan data sektoral dalam mendukung perencanaan pembangunan dan implementasi SDI tingkat daerah kota Banjarbaru;
15. Berkomunikasi dan berkoordinasi melalui rapat koordinasi dengan tim penyelenggara Satu Data Banjarbaru untuk segera membentuk forum SDI tingkat daerah Kota Banjarbaru;
16. Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaksanaan urusan persandian dengan menyesuaikan pelaksanaan hasil pemetaan urusan persandian. Mengupayakan Level kelembagaan pelaksana urusan persandian memiliki kecenderungan

naik grade sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pelaksana urusan persandian.;

17. Meningkatkan Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi dilaksanakan secara matang. Salah satunya diupayakan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM dengan mengikuti bimtek, workshop, seminar dan/atau focus group discussion untuk pengelola sistem elektronik dan pengelola keamanan informasi dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur;
18. Mengupayakan peningkatan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang menangani keamanan informasi;
19. Peningkatan kualitas layanan keamanan informasi melalui literasi budaya kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.